



RENCANA KERJA TAHUN 2026



**DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT karena telah tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026. Rencana Kerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, penyusunan dokumen ini berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dokumen ini memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya, Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun Anggaran 2026. Materi Rancangan Akhir Renja ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

Demikian penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026 ini, semoga dapat bermanfaat dan menjadi pedoman perencanaan pembangunan dan untuk kelancaran serta keberhasilan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan abupaten Kaur dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kaur.

Bintuhan, Januari 2026

**Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Kaur**

ISMAWAR HASDAN, S.T.,M.Si

NIP. 19790816 200312 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Disperkimtan	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD	31
3.3. Program dan Kegiatan	32
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
BAB V PENUTUP	36
Lampiran – Lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja yang selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026 merupakan bagian dari pelaksanaan perencanaan tahun terakhir dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029. Oleh karena itu dalam penyusunan RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026 harus selaras dengan dokumen perencanaan tersebut beserta peraturan turunannya.

RENJA Perangkat Daerah merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. RENJA Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang merupakan input/masukan dalam penyusunan RAPBD;

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Mengingat beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026. RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi dasar yang objektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen target serta sasaran masa depan pada masing-masing program/kegiatan setiap urusan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2003 tanggal 23 Mei 2003 (lembaran negara Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2003 tambahan lembaran Negara nomor 4266) tentang pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Seluma dan Kabupaten Kaur;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi Lembaga Teknis Daerah kabupaten Kaur;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Peraturan Daerah Kabupaten kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran Tahun 2025 dan perkiraan capaian pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Kabupaten Kaur.

Secara umum, tujuan dari disusunnya RENJA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026 adalah:

1. Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026;
2. Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026 dan;
3. Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar Substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (TAHUN 2025)

Bab ini menjelaskan hasil kegiatan tahun lalu atau tahun sebelumnya

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, memuat rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 berikut sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur

Evaluasi hasil pelaksanaan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 dilakukan dengan melihat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2021–2026. Evaluasi sampai dengan Bulan September 2025 atau triwulan ketiga Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan GAji dan Tunjangan ASN
 2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 4. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengembangan Perumahan

- a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 1. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi
 2. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Program Kawasan Permukiman

- a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 1. Penyusunan / Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
- b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - 1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - 2. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- a. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - 1. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan

5. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- a. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berikut ini adalah capaian sasaran perangkat daerah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur pada tahun 2025 dengan incian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2025 :

Tabel 2.1
Capaian Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025

URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.325.961.198	2.914.142.220	411.818.978
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	17.740.927	9.350.711	8.390.216
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	3.689.691	-	3.689.691
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>	3.566.564	3.192.000	374.564
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra dan Renja PD</i>	10.484.672	6.168.711	4.325.961
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.624.923.440	2.296.891.455	328.031.985
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.560.581.494	2.235.060.349	325.521.145
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan</i>	55.560.000	54.560.000	1.000.000
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3.680.086	3.286.000	394.086
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	5.101.860	3.985.106	1.116.754
Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.201.631	155.598.702	34.602.929
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	20.837.916	-	20.837.916
<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	28.465.315	21.334.542	7.130.773
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan</i>	12.148.400	5.764.160	6.384.240
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	128.750.000	128.500.000	250.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.095.200	449.435.852	37.659.348
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	321.195.200	311.835.852	9.359.348
<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	165.900.000	137.600.000	28.300.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000	2.865.000	3.134.500
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	6.000.000	2.865.000	3.134.500
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	106.500.000	92.562.000	13.938.000
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	106.500.000	92.562.000	13.938.000

Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	106.500.000	92.562.000	13.938.000
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	549.077.000	548.276.331,25	550.818,75
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	65.500.000	65.250.150	50.000.000
Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	65.500.000	65.250.150	50.000.000
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	483.577.000	483.026.181,25	3.269.882
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	207.450.000	207.400.000	3.269.882
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	276.127.000	275.626.181,25	3.269.882
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	434.949.232	431.679.350	3.269.882
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	434.949.232	431.679.350	3.269.882
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum	434.949.232	431.679.350	3.269.882
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	586.400	-	586.400
Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	586.400	-	586.400
Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	586.400	-	586.400
TOTAL ANGGARAN	4.417.073.830	3.986.659.901,25	430.413.928,75

Sumber : Bagian Keuangan Disperkimtan, 2025

Lebih detail realisasi anggaran dan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025, ditampilkan pada Table 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Tahun 2025 Kabupaten Kaur ditampilkan pada lampiran 1 dokumen ini.

Dari hasil penjabaran realisasi belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025 diatas, dapat diketahui bahwa total realisasi anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **3.986.659.901,25,-** atau sebesar 90,26% dari total anggaran sebesar Rp. **4.417.073.830,-**. Sisa penggunaan anggaran adalah sebesar Rp. **430.413.928,75,-**.

Anggaran terbesar pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 adalah untuk Program Kawasan Permukiman dan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum. Untuk Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran sebesar 207.450.000 yang mencakup kegiatan perbaikan RTLH untuk 10 unit rumah di Kecamatan Kinal Desa Pinang Jawa 2 sebanyak 5 rumah dan Desa Gunung Terang sebanyak 5 rumah yang masing-masing penerima bantuan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,-. Dan keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target. Untuk Program Peningkatan PSU yaitu mencakup kegiatan pemeliharaan dan perbaikan Listrik sebagai sarana prasarana wajib di permukiman, dan keseluruhan pelaksanaan anggaran dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan target.

Terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan target diantaranya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD karena masih tersedia kebutuhan harian kantor dari kegiatan lain, Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor karena peralatan dan perlengkapan kantor yang direncanakan tidak sesuai spesifikasi yang diperbolehkan, dan Kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan karena belum ada masyarakat yang terdampak karena ganti rugi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kaur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 100 Tahun 2024 tentang Perubahan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur adalah unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. Pelaksanaan teknis kebijakan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan 2 urusan yaitu

- 1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat.
- 2) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pertanahan.

Pelaksanaan kedua urusan ini dilaksanakan dengan 4 Program dan 13 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Capaian kinerja pelayanan pada tahun 2025 indikator kinerja pelayanan mengacu pada SPM dan IKK berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025–2029.

Dalam menentukan tolak ukur dan indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, setelah mengacu pada Indikator Kinerja Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai kepala daerah, indikator ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas) sebagai Indikator Tujuan pada sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kemudian dijabarkan sebagai indikator Program dan Indikator Kegiatan pada level Eselon III dan Eselon IV maupun fungsional.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur tercantum dalam Tabel sebagai berikut :

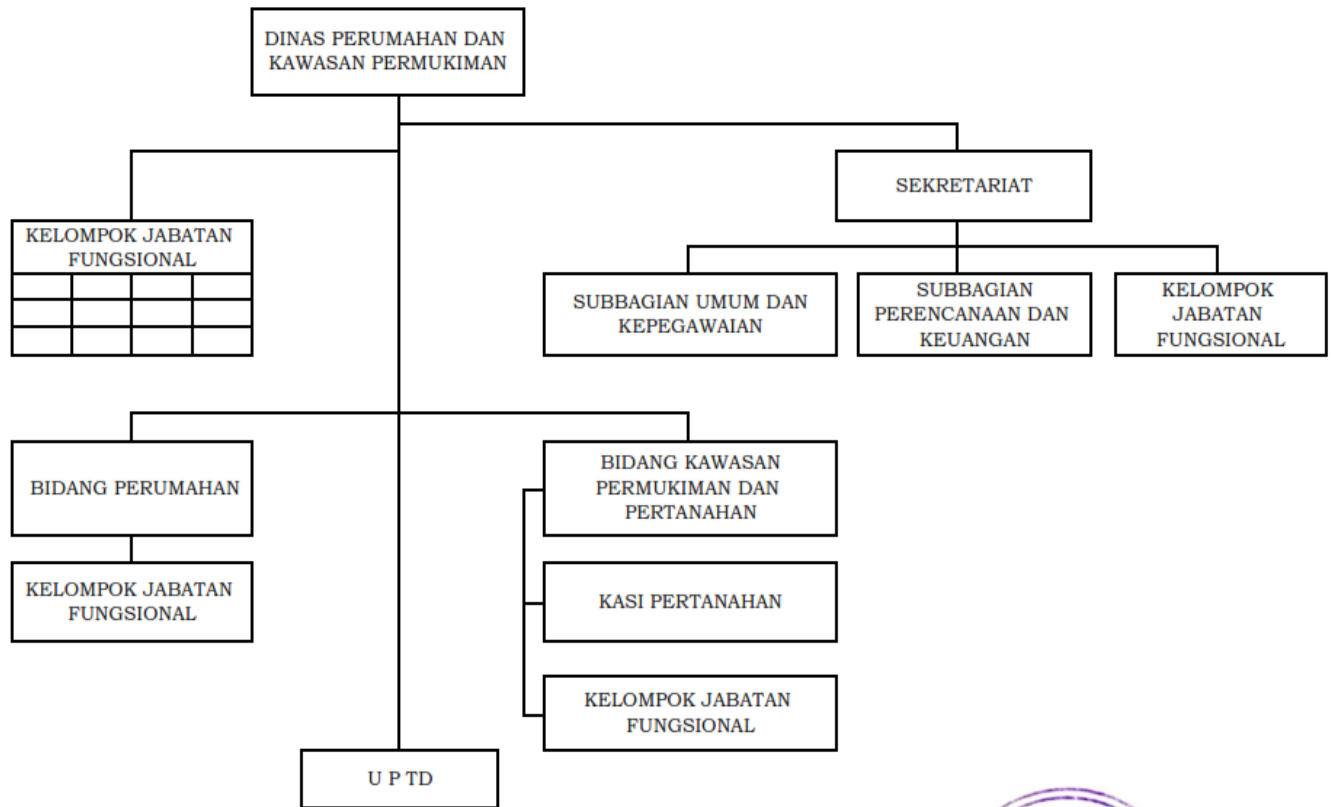
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DISPERKIMTAN Kabupaten Kaur

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Presentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni	0.35 %	9-8 %	7%	7%	20 %	22%	20,69%	0,86%	1,64%
2	Persentase Luas Lingkungan Permukiman Kumuh	0,51%	14-11 %	10 %	10 %	4-2 %	3,7 %	3,6 %	96,43%	0,04%

Sumber : Dokumen Renstra Disperkimtan 2025-2029

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat sejumlah aparatur maupun tenaga pendukung. Jumlah karyawan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur pada saat ini sebanyak 42 Orang, yang terdiri dari 31 Orang ASN yaitu 22 orang PNS dan 9 orang PPPK dan 11 Orang Tenaga Honorer. Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur pada Gambar.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Kaur



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan

sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026 ini mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Kaur, yaitu *“Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.”*

Berdasarkan hasil analisis data dan permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing urusan pembangunan daerah khususnya untuk kedua urusan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman, dan urusan non pelayanan yaitu urusan Bidang Pertanahan, dapat dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kaur Tahun 2026 yang perlu diprioritaskan dalam pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya ketersediaan database perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang valid dan mutakhir.
2. Masih terdapat permukiman kumuh yang belum tertangani yaitu seluas 82,93 Ha.
3. Masih terdapat lebih dari 20.000 rumah tidak layak huni di Kabupaten Kaur
4. Masih minimnya dana untuk penanganan perumahan maupun permukiman kumuh.
5. Belum optimalnya penanganan korban bencana dan penduduk yang terkena relokasi program pemerintah yang seharusnya mendapatkan rumah layak huni.
6. Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan.
7. Kurang optimalnya Penyediaan PSU permukiman.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Kabupaten Kaur. Disamping itu dokumen Rencana Kerja juga memuat Program Kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Dengan demikian akan dapat diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Kabupaten Kaur.

Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kaur dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 seperti yang telah tersaji pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kaur

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Uraian	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Anggaran (Rp)	
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4.026.502.405				7.970.157.983	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disperkimtan	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran		3.225.312.591	Disperkimtan			3.783.324.514	
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Disperkimtan</i>			<i>21.105.747</i>	<i>Disperkimtan</i>			<i>11.317.164</i>	
<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>		<i>Adanya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>6.207.358</i>		<i>Adanya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>3.754.995</i>	
<i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD</i>		<i>Adanya dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4.965.620</i>		<i>Adanya dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>3.105.168</i>	
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra dan Renja PD</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan urusan selain renstra PD dan renja PD yang disusun</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>9.932.769</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan urusan selain renstra PD dan renja PD yang disusun</i>		<i>4.457.001</i>	

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Disperkimtan			2.697.673.663	Disperkimtan		3.040.244.008	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima tunjangan dan gaji ASN	22 orang/bulan	2.633.179.433		Jumlah orang yang menerima tunjangan dan gaji ASN	2.971.863.223	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	55.560.000		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	61.680.000	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Adanya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasai penyusunan laporan	1 Laporan	3.989.019		Adanya Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasai penyusunan laporan	3.142.593	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Adanya jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordiansi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 Laporan	4.945.211		Adanya jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordiansi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3.558.192	1 Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Disperkimtan			331.590.644	Disperkimtan		233.729.091	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1 Paket	56.840.862			51.827.222	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1 Paket	49.933.342		Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	28.049.194	1 Laporan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan	1 paket	24.816.440		Jumlah paket barang cetakan	13.652.675	1 paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	200.000.000		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	140.200.000	1 Laporan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penambahan nilai asset tetap		942.500				

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit	942.500					
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Jasa Urusan	Disperkimtan	Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran	100%	168.000.037	Disperkimtan			455.694.251	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	1 Laporan	12.000.037		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya dan listrik yang disediakan	1 Laporan	327.694.251	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	156.000.000		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	128.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Disperkimtan		100%	6.000.000	Disperkimtan			42.340.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 unit	6.000.000		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Laporan	42.340.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Disperkimtan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana yang terkena relokasi akibat program pemerintah		105.019.472	Disperkimtan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana yang terkena relokasi akibat program pemerintah		145.000.000	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Disperkimtan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		5.864.906	Disperkimtan			145.000.000	

	<i>Idenifikasi Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>		<i>Jumlah dokumen data identifikasi lahan yang potensial sebagai Lokasi relokasi perumahan</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>942.110</i>					
	<i>Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah SUsun dan Rumah Khusus</i>		<i>Jumlah Dokumen data rmah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>4.922.796</i>		<i>Jumlah Dokumen data rmah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>145.000.000</i>	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	Disperkimtan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		88.001.696	Disperkimtan				
	<i>Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan n tanggap bencana</i>		<i>Jumlah orang /sukarelawan yang mengikuti sosialisasi</i>	<i>10 orang</i>	<i>50.501.696</i>					
	<i>Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan</i>		<i>Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan</i>	<i>50 orang</i>	<i>37.500.000</i>		<i>Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan</i>	<i>50 orang</i>		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Disperkimtan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		8.920.010	Disperkimtan				
	<i>Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</i>		<i>Jumlah rumah korban bencana kab/kota yang terehabilitasi</i>	<i>100 unit</i>	<i>4.954.290</i>					
	<i>Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana</i>		<i>Jumlah rumah korban bencana kab/kota yang terbangun</i>	<i>5 unit</i>	<i>1.982.860</i>					
	<i>Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Kab/Kota</i>		<i>Jumlah rumah tangga bagi korban bencana Kab/Kota yang mendapat fasilitasi penyediaan rumah</i>	<i>10 RT</i>	<i>991.430</i>					

	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota		Jumlah rumah tangga yang terdampak relokasi program pemerintah kab/kota yang mendapat fasilitas penyediaan rumah	10 RT	991.430					
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni		1.241.430					
	Pembangunan Rumah Khusus		Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	1 unit	991.430					
	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang Merupakan Aset Pemerintah Kab/Kota		Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan operasional dan pemeliharaan	1 unit	250.000				47.947.316	
	Penertiban Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Disperkimtan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		991.430	Disperkimtan				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi	1 laporan	991.430					
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Disperkimtan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	90%	231.157.098	Disperkimtan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		257.000.390	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Disperkimtan	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani		3.300.000	Disperkimtan				
	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP		Jumlah dokumen rencana pembangunan dan	1 Dokumen	3.300.000		Jumlah dokumen rencana Pembangunan dan pengembangan Kawasan	1 Dokumen		

			<i>pengembangan Kawasan permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan/ review serta terlegalisasi</i>				<i>permukiman dan permukiman kumuh yang tersusun dan/ review serta terlegalisasi</i>			
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Disperkimtan	Persentase luas kawasan kumuh yang ditangani		227.857.098	Disperkimtan			257.000.390		
<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</i>		<i>Jumlah RTLH yang diperbaiki</i>	<i>30 unit</i>	<i>215.000.000</i>		<i>Jumlah RTLH yang diperbaiki</i>	<i>10 unit</i>	<i>257.000.390</i>		
<i>Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh</i>		<i>Luas kawasan permukiman kumuh yang diremajakan</i>	<i>5 Ha</i>	<i>498.414.000</i>						
<i>Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah Sepuluh Ha</i>		<i>Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitasi penyediaan perumahan sementara bagi masyarakat yang terkena program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah Sepuluh Ha</i>	<i>5 RT</i>	<i>494.414</i>						
<i>Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah Sepuluh Ha</i>		<i>Jumlah rumah baru layak huni untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas dibawah sepuluh ha</i>	<i>5 unit</i>	<i>9.908.580</i>						
<i>Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh</i>		<i>Luas permukiman kumuh yang dipugar</i>	<i>5 Ha</i>	<i>1.951.690</i>						
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Disperkimtan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana yang terkena relokasi akibat	90%	991.430	Disperkimtan					

		program pemerintah							
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota	Disperkimtan	Persentase luas kawasan kumuh sepuluh sampai lima belas Ha yang ditangani		991.430	Disperkimtan				
Pembangunan rumah baru layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru		Jumlah rumah baru layak huni yang dibangun dalam rangka pencegahan kumuh	5 unit	991.430		Jumlah RT yang mendapatkan fasilitas penyediaan perumahan sementara bagi Masyarakat yang terkena program peremajaan	1 Rumah Tangga		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Disperkimtan	Persentase penanganan penyerahan psu secara fisik	90%	300.348.234	Disperkimtan	Persentase penanganan penyerahan psu secara fisik		398.421.280	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Disperkimtan		1 Dokumen	300.348.234	Disperkimtan			398.421.280	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Jumlah dokumen perencanaan penyediaan psu perumahan	1 dokumen	991.430					
Penyediaan PSU di Perumahan		Jumlah Lokasi perumahan yang disediakan PSU	1 lokasi	299.356.804		Jumlah Lokasi perumahan yang disediakan PSU		398.421.280	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Disperkimtan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah atau Garapan	90%	1.192.500	Disperkimtan				
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	Disperkimtan	Persentase terselesainya kasus tanah garapan		1.192500	Disperkimtan				
		Jumlah berita acara penyelesaian sengketa subjek hak potensi TORA di kab/kota	1 Berita Acara	250.000					
		Jumlah BA hasil mediasi	1 Berita Acara	942.500					

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Disperkimtan	Meningkatnya penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan		111.487.790	Disperkimtan	Meningkatnya penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan		3.300.825.260	
<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>	<i>Disperkimtan</i>	<i>Persentase penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</i>		<i>111.487.790</i>	<i>Disperkimtan</i>			<i>3.300.825.260</i>	<i>0</i>
		<i>Jumlah Keputusan bupati/walikota tentang penetapan penerimaan santunan tanah</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>942.500</i>					
		<i>Jumlah laporan koordinasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kab/kota</i>	<i>1 laporan</i>	<i>60.052.000</i>					
		<i>Jumlah laporan Penyelesaian santunan tanah untuk Pembangunan oleh pemerintah daerah Kab/ Kota</i>	<i>1 laporan</i>	<i>250.000</i>					
		<i>Jumlah laporan penyelesaian Ganti kerugian tanah</i>	<i>1 laporan</i>	<i>49.993.290</i>		<i>Terpenuhinya kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum</i>	<i>14.371 m²</i>	<i>2.249.040.000</i>	
		<i>Jumlah laporan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan potensial TORA dalam 1 daerah Kab/ Kota</i>	<i>1 laporan</i>	<i>250.000</i>					

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Disperkimtan	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap tanah objek reforma agrarian (TORA)	90%	49.993.290	Disperkimtan			85.586.539	
<i>Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan MAksimum dan Tanah Absentee Dalam 1 Daerah Kab/Kota</i>	<i>Disperkimtan</i>	<i>Tersedianya tnah objek landreform (TOL) yang siap didistribrusikan</i>		49.993.290	<i>Disperkimtan</i>			85.586.539	
<i>Koordinasi dalam rangka penataan asset reforma agraria</i>		<i>Jumlah berita acara dalam rangka penataan asset reforma agraria</i>	<i>1 Berita Acara</i>	<i>49.993.290</i>				<i>85.586.539</i>	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Disperkimtan		90%	1.000.000	Disperkimtan				
<i>Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kab/Kota</i>	<i>Disperkimtan</i>			<i>1.000.000</i>	<i>Disperkimtan</i>				
		<i>Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah dalam 1 Kab/Kota</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1.000.000</i>					

Sumber : Bagian Keuangan Disperkimtan, 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menginventarisasi usulan tahun lalu yang belum terealisasi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menginventarisasi permasalahan/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.
2. Menyesuaikan usulan-usulan tersebut apakah sudah disesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
3. Meneliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan. Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.
4. Memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
5. Membuat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat berdasarkan kesepakatan pada forum lintas OPD untuk penyempurnaan Rancangan Renja 2026 yang telah dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan bersama stakeholder dan mitra terkait dapat dilihat dalam tabel berikut:

Table 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Kaur

Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/ Volume	Sumber Dana
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Penyediaan Perumahan Bagi Korban Bencana		
<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				
<i>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	Kab. Kaur		Seluruh wilayah di Kabupaten Kaur khususnya daerah rawan bencana	
<i>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi</i>				
<i>Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan</i>	Kab. Kaur		Korban terdampak bencana	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase perbaikan rumah tidak layak huni		
<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</i>	Desa Sukamenanti Kec. Maje		10 unit	APBD
	Kabupaten Kaur		200 unit	APBN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase penanganan penyerahan PSU secara fisik		
<i>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</i>	Kabupaten Kaur			
<i>Penyediaan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	Kecamatan di Padang Guci	Pemasangan Tiang Listrik		APBD
	Kab. Kaur	Pemeliharaan prasarana listrik		PJU TS
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				
<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/ Kota</i>	Kab. Kaur	Pengadaan tanah untuk pembangunan/perluasan RSUD	1 lokasi	APBD

Sumber : Bagian Perencanaan Disperkintan, 2025

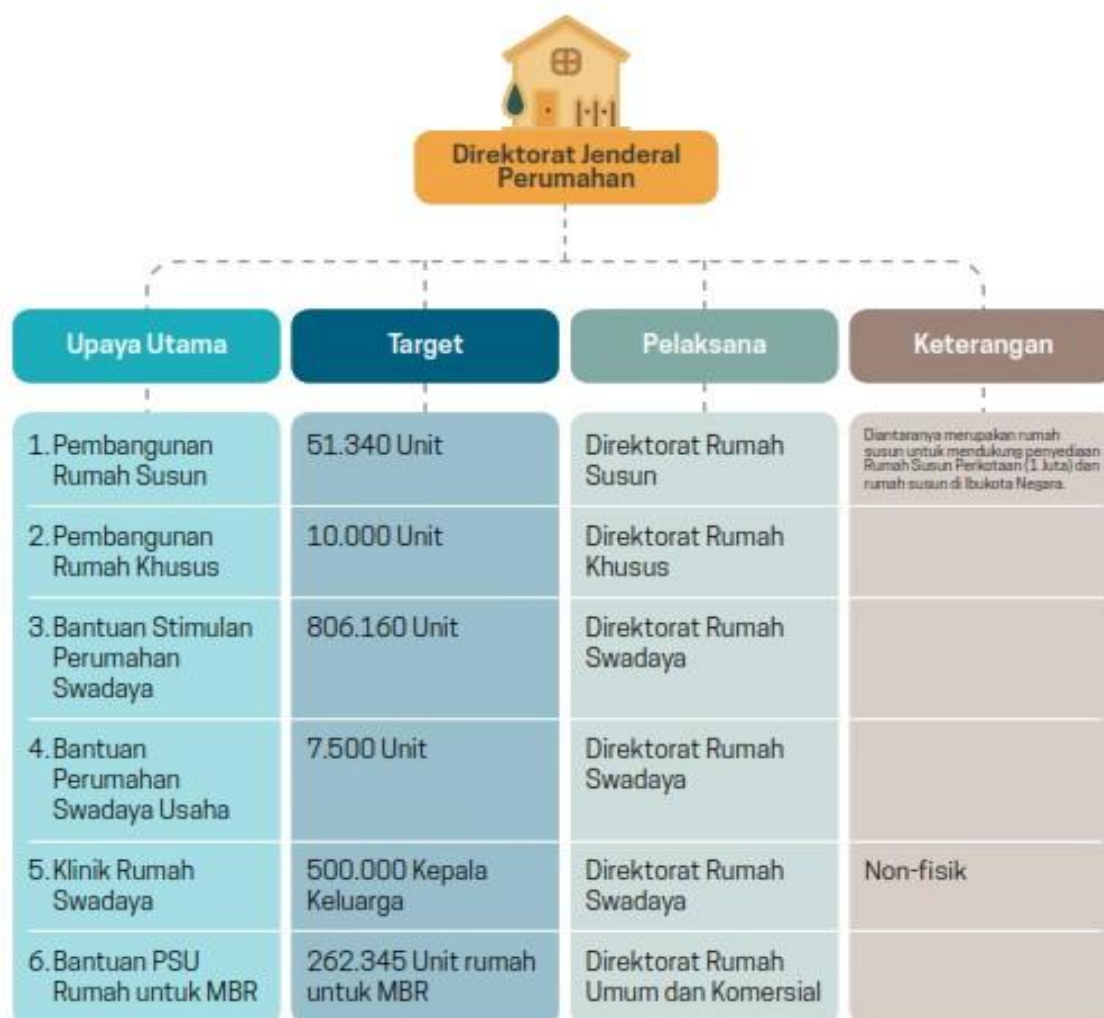
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terkait dengan Tupoksi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Kabupaten Kaur, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam mencapai tujuan strategi tersebut, terdapat 6 upaya utama yang dilakukan, oleh Ditjen Perumahan sebagai berikut:

Gambar 3.1



Sumber: Diolah dari Perpres No. 18 Tahun 2020

Gambar 3.2

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Perumahan
Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKS / IKP / IKK	Satuan	Base line	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN								
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
SS 3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau							
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni							
SK	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni							
	1. Jumlah rumah MBR yang mendapat bantuan PSU	Unit	N/A	8.500	40.000	55.000	70.000	88.845
	2. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Fasilitasi Rumah Swadaya bagi MBR	Unit	N/A	230.550	81.000	118.960	177.925	205.225
	3. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Khusus	Unit	N/A	822	2.440	2.300	2.138	2.300
	4. Jumlah pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni melalui Pembangunan Rumah Susun	Unit	N/A	1.171	7.982	12.787	15.900	13.500

Telaah terhadap kebijakan nasional oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur dilakukan dengan mengkaji Rencana Strategis (Renstra) Kementerian. Hal ini diperlukan untuk mengetahui fokus kinerja kementerian dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berfokus pada penyediaan perumahan layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Strategi Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun 2026 berfokus pada pengurangan backlog perumahan melalui program utama seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menargetkan renovasi 400.000 unit RTLH, serta pembangunan 2 juta unit rumah swadaya di berbagai wilayah.

Strategi ini juga mencakup penguatan program lainnya yang mendukung pencapaian target RPJMN 2025-2029, seperti pembangunan rumah umum, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan, serta pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM), penanganan air limbah, dan peningkatan kualitas kawasan kumuh di daerah.

Program Utama dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut :

1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS): Program ini menjadi prioritas untuk mengatasi backlog perumahan dengan target merenovasi 400.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi rumah layak huni.
2. Pembangunan Rumah Swadaya: Menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah swadaya di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan dengan dukungan anggaran yang signifikan.
3. Penyediaan Rumah Umum: Selain rumah swadaya, akan dibangun rumah umum beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk 18.609 unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan.

Sedangkan Program Pendukungnya meliputi kegiatan :

1. Penyediaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM): Fokus pada peningkatan akses air bersih di daerah kabupaten/kota. Penanganan Air Limbah: Melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik untuk meningkatkan sanitasi dan penanganan stunting.
2. Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh: Mengurangi kawasan permukiman kumuh perkotaan, khususnya untuk kawasan dengan luas di bawah 10 hektar, melalui peningkatan kualitas perumahan.
3. Penyelenggaraan PSU Perumahan: Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan di kawasan perumahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu strategis daerah dan permasalahan Pembangunan daerah serta mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Kaur tahun 2025-2029. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam Menyusun pilihan-pilihan strategi Pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026 pada dasarnya harus sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kaur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Visi	:	<i>MENUJU KABUPATEN KAUR YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BAHAGIA</i>
Misi 2	:	<i>“Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.”</i>

Tabel 3.1
Indikator, Tujuan dan Sasaran
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Kaur Tahun 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2025
Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dan Terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan (Persentase)	60,71
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	60
Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) (%)	60,71
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1
	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0,54
	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	3,5
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	76
	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase)	10
	Meningkatnya Penyediaan dan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	Jumlah bidang tanah yang didistribusi (Bidang Tanah)
	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	60
	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria (Kepala Keluarga)	150
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73-75
	Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah (Level)	Terdefinisi

Sumber : Dokumen Renstra Disperkimtan Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program, kegiatan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Kabupaten:

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Kaur Tahun 2026

A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
	3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra dan Renja PD
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
D	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
E	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
A	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
	1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah SUsun dan Rumah Khusus
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
A	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
	1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni

4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
A	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
	1	Penyediaan PSU di Perumahan
5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
A	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	
	1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
A	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	
	1	Koordinasi Dalam Rangka Penataan Aset Reforma Agraria

Sumber : Bagian Perencanaan Disperkintan, 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada Tahun Anggaran 2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur merancang Rencana Kerja yang terdiri dari 5 Program, 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur tahun 2024 dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Kaur tahun anggaran 2024. Sumber Dana Kegiatan, Pagu Indikatif, indicator kinerja serta target capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1 pada lampiran 2 dokumen ini.

BAB V

P E N U T U P

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2026 ini mengacu kepada dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Kaur, yaitu *“Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan Mitigasi Bencana.”*

Dengan adanya arah kebijakan umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur yang tertuang dalam dokumen Renja Tahun 2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan strategis dan prioritas program dinas serta penyusunan rancangan kegiatan dalam satu tahun anggaran, serta dapat memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak semua dapat dilaksanakan sendiri. Untuk itu diperlukan kerjasama lintas sektor terkait dan stakeholder yang kompeten. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan kerangka acuan yang telah dibuat sebelumnya, dan berjalan sesuai jadwal, maka dilakukan monitoring dan evaluasi pasca kegiatan.

Bintuhan, Januari 2026
**Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Kaur**

ISMAWAR HASDAN, S.T.,M.Si
NIP. 19790816 200312 1 005

